

# Efektifitas Program Desa Tangguh Bencana Di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang Untuk Mendukung Keamanan Nasional

<sup>1</sup>Yuli Rahmadani, <sup>2</sup>Sutanto, <sup>3</sup>Fauzi Bahar, <sup>4</sup>Wilopo  
<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Manajemen Bencana, Universitas Pertahanan RI

E-mail: [yulirahmadani81@gmail.com](mailto:yulirahmadani81@gmail.com),  
[pakarkeshan12853@gmail.com](mailto:pakarkeshan12853@gmail.com), [fauzibahar.fz@gmail.com](mailto:fauzibahar.fz@gmail.com),  
[wilopo02@gmail.com](mailto:wilopo02@gmail.com)

## ABSTRAK

Pentaheliks merupakan ujung tombak kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, salah satunya melalui melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang berjalan di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang sejak tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keefektifan program desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Mas dan menganalisis faktor faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pencapaian program atas beberapa aspek dalam indikator Desa Tangguh Bencana sesuai Perka BNPB tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana nilai yang diperoleh untuk kelurahan Tanjung Mas adalah 33 masuk dalam kategori Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama, Kelurahan Tanjung Mas sudah mencapai tujuan obyektif sebesar 55%. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan tujuan program adalah sebesar 58%. Hal ini berarti program dapat mencapai sebagian dari tujuan obyektif yang sudah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mengeluarkan SK Kepala Desa terkait pembentukan DTB merupakan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama untuk mendukung program DTB. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah imlementasi program desa tangguh bencana di Kelurahan Tanjung Mas kurang maksimal karena belum ada legalitas pembentukan program Desa Tangguh Bencana dan alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan untuk mendukung program DTB di Kelurahan Tanjung Mas adalah mengeluarkan SK Kepala Desa terkait pembentukan DTB.

**Kata kunci:** Efektifitas, Kesiapsiagaan, Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

## ABSTRACT

*Pentahelix is the spearhead of community-based disaster management policies. one of which is through the Desa Tangguh Bencana program that has been implemented in Tanjung Mas Village, Semarang City since 2017. The purpose of this research was to analyze the implementation and effectiveness of a disaster resilient village program in Tanjung Mas Village and analyze the factors that influence it. This research used descriptive qualitative research methods. The results of this study indicated that based on the level of program achievement on several aspects in the Tangguh Disaster Village indicators in accordance with the Perka of BNPB on the General Guidelines of the Tangguh Village / Kelurahan Disaster the value obtained for Tanjung Mas was 33 included in the category of Desa / Kelurahan Tangguh Disaster Pratama, Tanjung Mas Kelurahan has reached objective goals by 55%. The level of community preparedness based on program objectives was 58%. This means that the program can achieved some of the stated objectives. The results of the interviews showed that issuing a Decree of the Village Head related to the formation of Desa Tangguh Bencana was an alternative strategy that became the top priority to support the Desa Tangguh Bencana program. The conclusion of this research was that the implementation of a disaster resilient village program in Tanjung Mas Village is not optimal because there is no legality of establishing a Resilient Village Program and alternative strategies that are the main priority in making decisions to support the Desa Tangguh Bencana program in Tanjung Mas Village is issuing a Decree of the Village Head related to the establishment of Desa Tangguh Bencana.*

**Keyword :** Effectiveness, Preparedness, Disaster Resilient Villages/Sub-districts.

## 1. PENDAHULUAN

Bencana menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana terdiri dari tiga jenis yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana dapat memberikan dampak yang besar besar bagi suatu wilayah atau daerah, bahkan dapat mempengaruhi keamanan nasional suatu negara.

Oleh sebab itu peran pentaheliks yaitu pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, dan media massa jsangat diperlukandalam Penanggulangan Bencana. Apabila permasalahan bencana dapat ditangani secara cepat dan tepat, dengan hasil dapat mengurangi bahkan meniadakan risiko, kerugian atau korban bencana, maka akan mendukung stabilitas keamanan nasional. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rawan bencana dan setiap masyarakat berkewajiban menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Undang – undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 4 menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta untuk saling bersinergi dalam kesiapsiagaan bencana. Dengan paradigma penanggulangan bencana menuju paradigma mitigasi, sekaligus paradigma pembangunan maka pemberdayaan masyarakat harus ditingkatkan untuk lebih mengetahui tentang kebencanaan serta karakteristik wilayah masing-masing dari ancaman bahaya bencana.

Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di Kelurahan Tanjung Mas pada Tahun 2015 terjadi tanah longsor di RW IV dengan jumlah 5 RT dan jumlah penduduk 915 jiwa. Tanah longsor terjadi di RT.02/04 dikarenakan talud ambrol pada saat hujan deras. Kemudian tahun 2016 terjadi 4 lokasi tanah longsor di RW V dengan jumlah 7 RT dan jumlah penduduk 1.729 jiwa. Tanah longsor terjadi di RT 04, RT 05 tanah longsor terjadi disebabkan pohon besar tumbang yang

berada di Gombel Lama Secara ketinggian Kelurahan Tanjung Mas dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kelerengan 15-40% dan kondisi lereng (0-2%). Kondisi longsor yang terjadi di RW V yang diakibatkan oleh aktifitas manusia berupa penebangan pohon. Daerah ini memang dijadikan salah satu daerah penebangan pohon. Secara keseluruhan, karakteristik lokasi yang terjadi tanah longsor memiliki kesamaan dengan desa desa di Kecamatan Tanjung Mas khususnya Kelurahan Tanjung Mas. Berdasarkan data Daerah (BPBD) Kota Semarang, curah hujan di Kecamatan Tanjung Mas juga tergolong tinggi dengan rata-rata 2500- 3000 mm/th.

Selain kondisi fisik yang berpotensi longsor, faktor-faktor yang berhubungan dengan manusia juga berpengaruh pada tingkat kerawanan longsor, seperti kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mas yang diakibatkan oleh penggunaan lahan. Faktor yang berhubungan dengan manusia ini terutama pada kontak atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk hubungan manusia seperti bagaimana pemanfaatan lahan cara-cara Pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat sebagai aktor penting merupakan strategi utama dari inisiatif- inisiatif pengelolaan risiko bencana untuk membangun ketangguhan terhadap bencana. Pada umumnya dilaksanakan melalui unit pemerintahan terkecil yang dapat menysasar langsung ke masyarakat, yakni di wilayah desa atau kelurahan. Kebijakan yang dijalankan adalah program Desa Tangguh Bencana yang mengacu sesuai dengan dengan Perka BNPB. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana , sesuai dengan PP no. 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.4 Masyarakat yang siap dan waspada terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan risiko bencana.

Berdasarkan latar belakang masalah dengan fenomena bencana yang terjadi baik di tingkat global, regional, dan Indonesia, serta implementasi pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana di kelurahan Tanjung Mas, kota Semarang maka fokus penelitian ini adalah

tentang bagaimana pelaksanaan program desa tangguh dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, dengan sub fokus penelitian dapat dijabarkan dengan pertanyaan penelitian bagaimana implementasi pelaksanaan program desa tangguh bencana Kelurahan Tanjung Mas dan bagaimana keefektifan program desa tangguh bencana Kelurahan Tanjung Mas.

## 2. LANDASAN TEORI

### Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas: Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan guna, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Steers mengemukakan bahwa Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Inancevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektivitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

#### 1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. 2. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi. Efektivitas organisasi

Terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian

memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Abdulrahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Menurut Mulyasa Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

#### b. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah pada jalan yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.

e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

### **Keamanan Nasional**

Jika diartikan secara estimologis kata keamanan (security) berasal dari bahasa latin yaitu "securus" yang memiliki arti terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (Liota, 2002). Seiring dengan semakin banyak perkembangan dalam hubungan internasional, Barry Buzan mempunyai pengertian yang lebih luas dalam memaknai konsep keamanan, keamanan tidak hanya meliputi aspek militer dan aktor negara saja, melainkan melibatkan pula aktivitas-aktivitas dari aktor non-negara.

Barry Buzan membagi sektor keamanan ke dalam 5 bidang kategori, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Menurut pendekatan ini sektor militer hanyalah salah satu aspek penting dari konsep keamanan. Tetapi seiring

dengan semakin berkembangnya hubungan internasional, sumber ancaman tidak lagi bersifat militer.

Berbagai konsep keamanan melibatkan banyak aktor yang beragam yang terlihat dari dinamika interaksi antara sektor dan aktor keamanan (Buzan, 1997).

Sistem pertahanan dan keamanan harus diarahkan dengan baik untuk menjamin penegakkan suatu Negara dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Burhan D. Magenda (2003) menyebutkan bahwa sangat penting untuk memikirkan ideologi nasional serta sistem politik, ekonomi dan sosial budaya. Lembaga-lembaga yang fungsional yang merupakan sumber daya nasional seperti aparatur negara, masyarakat politik (Ormas dan LSM) serta partai politik. Juga diperlukan masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil (civil society). Dinamika permasalahan keamanan seperti itu mengubah konsep keamanan nasional dari state center security kepada people centered security. Konsekuensinya, keamanan menjadi keamanan comprehensive dan manajemen keamanan membutuhkan kerjasama antar aktor dan lembaga keamanan. Dalam konteks ini, keamanan nasional dimaknai sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa dengan menggunakan kekuatan politik, militer dan ekonomi untuk menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa keamanan nasional di Negara demokrasi umumnya mencakup keamanan Negara, keamanan masyarakat dan keamanan manusia (state security, public security dan human security (Mukhtar, 2005). Agar dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai keamanan nasional (national security), kita harus melihat beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Benyamin Miller. Dimensi pertama yang perlu diketahui merupakan dimensi "the origin of threats". Dimana ancaman-ancaman keamanan dapat berasal dari domestik maupun global. Dalam penelitian ini ancaman keamanan sudah mencakup secara global karena berkaitan

dengan mobilitas orang asing yang datang ke Indonesia. Kemudian dimensi yang kedua adalah “the nature of threats”, secara tradisional dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, namun sejalan dengan berkembangnya hubungan nasional maupun internasional, telah merubah sifat ancaman menjadi lebih rumit. Baik ancaman yang mengancam stabilitas nasional maupun internasional yang disebabkan interaksi antar aktor negara dan non negara.

Dalam penelitian ini mobilitas warga asing yang terjadi di Indonesia dapat mengancam stabilitas keamanan nasional, contohnya melalui berbagai pelanggaran baik dilakukan secara pidana maupun perdata. Melalui berbagai isu dan sifat-sifat ancaman yang baru, memiliki korelasi dengan dimensi ketiga yaitu “changing response”. Bila selama ini respon yang muncul adalah tindakan militer, maka kini isu-isu tersebut diatasi dengan berbagai pendekatan non-militer seperti ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Dalam penelitian ini, negara melihat isu pelanggaran orang asing kemudian mengatasinya dengan melakukan berbagai kebijakan keimigrasian yang memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat memberikan batasan-batasan yang jelas bagi warga negara asing yang mengancam keamanan nasional Indonesia, sehingga pengawasan terhadap warga negara asing dapat terkoordinasi semakin baik (Syahrudin, 2019).

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu strategi pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019).

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuisioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang akan dijawab oleh informan. Instrumen yang terlampir untuk mengetahui implementasi program yang telah ditetapkan dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Instrumen Penilaian Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dari Perka BNPB

b. Instrumen Kesiapsiagaan Masyarakat dari LIPI-UNESCO/ISDR yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Di dalam pemeriksaan keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas (dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang di peroleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian.

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas (validity interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas atas dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Teknik analisis data dalam penelitian ini terdapat empat langkah yaitu: mengumpulkan data, data Condensation, Data Display, dan conclusion Drawing/Verifications.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian, Kelurahan Tanjung Mas berada di wilayah kota Semarang yang secara geografis terletak berbatasan dengan laut jawa di bagian utara, serta kondisi topografis wilayahnya yang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan yang menyebabkan wilayah Kota Semarang mempunyai potensi rawan terhadap ancaman bencana alam. Berdasarkan data laporan kebencanaan yang tercantum dalam situs resmi BNPB RI, tercatat sebanyak 192 kejadian, puting beliung, dan kebakaran pada rentang tahun 1990 – 2018 (DIBI, 2019). Berikut merupakan tabel kejadian bencana

berdasarkan data BPBD Kota Semarang sepanjang tahun 2018. Tabel 1. Data Kejadian Bencana Kota Semarang 2018

Jenis Bencana	Jumlah
Banjir	36
Tanah Longsor	82
Puting Beliung	5
Kebakaran	69

Sumber : DIBI, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kejadian bencana di Semarang masih cukup tinggi dengan jumlah kejadian terbanyak adalah tanah longsor, sebanyak 82 kali. Dengan tingginya angka kejadian bencana, serta luasnya daerah rawan bencana yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan diperoleh hasil kerentanan Kelurahan Tanjung Mas adalah sebagai berikut :

a. Kerentanan Fisik, kondisi alam berupa perbukitan yang dialihfungsikan sebagai daerah pemukiman. Kondisi pemukiman kumuh serta daerah pasar jatingaleh juga rentan akan ancaman kebakaran.

b. Kerentanan Sosial, kurangnya kesadaran akan pendidikan tinggi sehingga mempengaruhi tingkat pengetahuan mereka. Sebanyak 16,5 % penduduk tidak tamat SD dari jumlah penduduk yang ada. Lokasi kelurahan Tanjung Mas yang merupakan jalur menuju stadion Jatidiri juga dapat menjadi ancaman sosial tawuran antar supporter sepak bola.

c. Kerentanan Ekonomi, jumlah penduduk yang tidak produktif sebesar 27% dapat menyebabkan masalah sosial di wilayah kelurahan Tanjung Mas.

d. Kerentanan Lingkungan, rendahnya kesadaran sebagian warga yang membangun pemukiman di wilayah rawan bencana seperti di daerah lereng bukit dan wilayah resapan air. Pengetahuan dan pemahaman warga mengenai kebencanaan masih belum menyeluruh.

Berdasarkan tingkat pencapaian program atas beberapa aspek dalam indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang ada dalam kuesioner sesuai Perka BNPB tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (perhitungan pada lampiran 2), maka kuesioner dengan 60 pertanyaan yang diberikan kepada ketua FPRB dan Lurah kelurahan Tanjung Mas, didapatkan jawaban “Ya” sebanyak 33 pertanyaan dan 27 pertanyaan memperoleh jawaban “Tidak”, maka nilai yang diperoleh untuk kelurahan Tanjung Mas adalah 33 masuk dalam kategori Desa/Kelurahan

Tangguh Bencana Pratama.

Penilaian tersebut berarti ada upaya awal yang dilakukan dalam setiap aspek dari DTB mulai dari adanya tim relawan desa/kelurahan dalam forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang akan dijadikan SOP, dan yang terpenting adanya upaya sistematis. Dari hasil wawancara dengan narasumber untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.

Dengan hasil tersebut menurut Ralph. W Tyler (2011) berarti program dapat mencapai sebagian dari obyektifnya dan dapat dilanjutkan dengan perbaikan berdasar pada evaluasi yang telah dilakukan. Dari hasil wawancara, alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan untuk mendukung program DTB di Kelurahan Tanjung Mas adalah dengan segera mengeluarkan SK Kepala Desa terkait pembentukan DTB. SK tersebut bisa dikeluarkan oleh kepala desa. Adanya SK tersebut dapat menjadi payung hukum pelindung untuk seluruh kegiatan DTB. Sesuai dengan Perka BNPB, adanya SK DTB juga mendorong adanya pemaduan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan desa. Hal ini juga mendorong adanya alokasi pendanaan baik dari kelurahan maupun swasta yang akan masuk apabila program DTB dimasukkan dalam rencana pembangunan desa dan dilindungi payung hukum berupa SK Kepala Kelurahan Tanjung Mas..

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dari penelitian ini terdiri dari implementasi program desa tangguh bencana dan efektifitas program desa tangguh bencana Kelurahan Tanjung Mas. Efektifitas implementasi program desa tangguh bencana Kelurahan Tanjung Mas baru mencapai sebagian dari tujuan obyektif yang sudah ditetapkan dengan hasil nilai indikator DTB di Kelurahan Tanjung Mas memperoleh skor 33 dengan presentase keberhasilan sebesar 55% sehingga masuk dalam kategori desa tangguh bencana pratama. Belum ada SK terkait dengan program DTB di Kelurahan Tanjung Mas namun sudah ada upaya awal untuk penyusunan kebijakan PRB dan yang paling penting adalah adanya upaya yang sistematis dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana

Keefektifan program desa tangguh bencana Kelurahan Tanjung Mas dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan 20 orang narasumber yang menunjukkan nilai rata-rata

kesiapsiagaan masyarakat sebesar 58%. Faktor yang mempengaruhi keefektifan program DTB terdiri dari faktor internal dan eksternal. Berdasarkan kesimpulan, Hasil wawancara menunjukkan bahwa alternatif strategi yang menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan untuk mendukung program DTB di Kelurahan Tanjung Mas adalah mengeluarkan SK Kepala Desa terkait pembentukan DTB. Adanya SK tersebut dapat menjadi payung hukum pelindung untuk seluruh kegiatan DTB. Sesuai dengan Perka BNPB, adanya SK DTB juga mendorong adanya pemaduan rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan desa

#### **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sutanto, S.Km., M.Si. atas bimbingan, masukan, serta dukungan yang berharga sepanjang pelaksanaan penelitian ini. Semoga temuan penelitian mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Aji Prasetyo, dkk. (2013). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Diponegoro Law Review*, vol 1(2) pp. 1-10
- Anggoro, K. (2003, July). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum. In *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*. Denpasar: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Aitsi-Selmi, A., Egawa, S., Sasaki, H., Wannous, C., & Murray, V. (2015). The Sendai framework for disaster risk reduction: Renewing the global commitment to people's resilience, health, and well-being. *International Journal of Disaster Risk Science*, vol. 6(2), 164-176.
- Cresswell, W. John. (1994). *Research Design: Qualitative And Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Ethnography: Principles in Practice* (3rd ed). London ; New York: Routledge.
- Dunn N, William. (2000). *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly, Organisasi, (2001) terjemahan Agus Dharma, (Jakarta:erlangga,2001), hal 120.
- Sondang P. Siagian, (2002) *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92
- Agusman M. Ali, (2014), *Pengantar Konflik Sosial*, Jakarta: Pustaka Iltizam. Hal 47.
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hal 82
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu 1996Administrasi Negara dan Manajemen*, (Jakarta: PT. Gunung Agung,), hal 15.
- Gunawan. (2009). *Studi Evaluatif Tentang Penanggulangan Bencana Alam: Peran TAGANA Dalam Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Untuk Mengurangi Resiko Bencana Alam*. Jakarta: P3KS Press.
- Irawan, Prasetya (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: DIA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Lassa, J., Pujiono, P., Pristiyanto, D., et all. (2009). *Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*. Jakarta: Grasindo.
- Maarif, Syamsul (2012). *Menuju Indonesia Tangguh. Makalah Rapat Koordinasi dan Pelatihan Tingkat Nasional Tahun 2012*. Jakarta: BNPB, 2012
- Pujiyanto. (2012). *Analisis Ketangguhan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Pemukiman Bantaran Kali Ciliwung*. Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Syamsiah, Noorma. (2012). *Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Ancaman Gunung Berapi (Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat)*. Program Studi Manajemen Bencana, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Cet. XV (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Saldaña, J. (2011). *Fundamentals of Qualitative Research: Understanding Qualitative Research*. New York: Oxford University Press.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokus Media 2006)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress
- Wirawan. 2011. *Evaluasi (Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi)*. Jakarta: Rajawali Pers.